

# Problematika Kebijakan Penetapan Ibu Kota Negara Dan Evaluasi Dampak Sosialnya

Muhammad Husein<sup>1</sup>; Dian Wahyudin\*<sup>2</sup>

e-mail : [muhammadhusein1@unida.ac.id](mailto:muhammadhusein1@unida.ac.id)<sup>1</sup>; [zahidah181011@gmail.com](mailto:zahidah181011@gmail.com)<sup>2</sup>

Universitas Iskandar Muda<sup>1</sup> Institut Ilmu Sosial dan Manajemen Stiami<sup>2</sup>

\*corresponding author

## ARTICLE INFO

## ABSTRACT

### Keywords :

*Kebijakan, Konflik Sosial, Pendapatan, Adat Istiadat*

Penelitian ini membahas tentang Problematika Kebijakan Penetapan Ibu Kota Negara Dan Evaluasi Dampak Sosialnya. Penelitian ini didasarkan atas problematika yang sampai hari ini menjadi issue Nasional. Melalui metode analisis deskriptif diperkuat dengan pemikiran yang konstruktif serta berbagai literatur yang memiliki relevansi dengan kondisi terkini sesuai dengan fakta, penelitian ini menyajikan berbagai fenomena yang terjadi terhadap kebijakan penetapan Penajam Pasir Utara sebagai Ibu Kota Negara. Hasil dari Penelitian ini memberikan masukan kepada Pemerintah Pusat dan pihak-pihak terkait termasuk pemerintah daerah tentang Problematika dan dampak Sosial, ekonomi yang dirasakan baik langsung maupun tidak terhadap konstelasi kehidupan masyarakat, misalnya pelestarian nilai adat istiadat masyarakat disekitar IKN, Konflik sosial, peningkatan pendapatan serta pekerjaan baru bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat bangsa dan negara.

## PENDAHULUAN

Alasan utama pemindahan IKN keluar Pulau Jawa adalah pemerataan ekonomi. Aktivitas pemerintahan dan bisnis yang berpusat di Pulau Jawa khususnya DKI Jakarta, telah menghambat pertumbuhan pusat-pusat perekonomian baru di luar Pulau Jawa. Urgensi mengatasi ketimpangan semakin penting bila dikaitkan dengan kecenderungan bahwa sebuah wilayah yang sudah lebih maju akan mengalami percepatan pertumbuhan ekonomi dibandingkan wilayah yang masih tertinggal. Oleh karena itu, pemerintah, baik di negara yang menganut sistem perekonomian pasar maupun terpusat akan mengarahkan pembangunan untuk mengurangi disparitas antar wilayah. Dengan semakin kecilnya disparitas antar wilayah, maka potensi percepatan pertumbuhan ekonomi secara nasional akan semakin tinggi. Ketimpangan antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa terjadi pada banyak aspek. Secara agregat kesejahteraan masyarakat di lokasi IKN baru akan meningkat dan berpotensi untuk mengurangi ketimpangan ekonomi antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. (Silalahi, 2019) Dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, maka pemindahan ibu kota sedapat mungkin agar mengacu pada konektivitas perekonomian sebagai pemicu dalam meningkatkan perekonomian pulau-pulau besar di Indonesia. Ketimpangan perekonomian cenderung sebagai penyebab tingginya animo masyarakat untuk lebih konsen terhadap bagaimana menciptakan perekonomian yang lebih merata. Isu pemerataan ekonomi dalam konteks pemindahan ibu kota menjadi urgensi tersendiri untuk dapat dipahami lebih lanjut. (Taufiq, 2020) Dari beberapa teori yang dikemukakan diatas, maka pada bahasan selanjutnya, pemindahan ibu kota negara yang bertujuan untuk mendukung proses pembangunan nasional, tinjauannya akan lebih diarahkan pada pembangunan bidang ekonomi.

Implementasi kebijakan pembangunan baik tingkat nasional ataupun daerah, apapun konteksnya, baik bidang ekonomi, sosial, atau hukum, tidak terlepas dari keharusan adanya monitoring dan evaluasi. Perlunya kegiatan dari monitoring atas suatu kebijakan, ini tentunya

demi menjaga agar sebuah kebijakan yang diimplementasikan sesuai dengan tujuan ataupun sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Disamping itu, kegiatan monitoring evaluasi ini bertujuan agar mampu meminimalisir faktor risiko yang mungkin terjadi. Pindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Penajam Paser Utara Kalimantan dengan tujuan agar tercipta pemerataan pembangunan, tentu dalam pelaksanaannya harus dilakukan monitoring maupun evaluasi. Terkait dengan proses ini, analisis yang tidak kalah penting adalah terkait analisis dampak social yang mungkin ditimbulkan dari pindahan Ibu Kota Negara ini. Pindahan Ibu Kota Negara diharapkan akan mampu mendorong peningkatan jumlah investasi di provinsi ibu kota baru dan sekitarnya sehingga mampu meningkatkan output beberapa sektor non-tradisional terutama sektor Jasa. Banyak hal yang diharapkan dari pindahan Ibu Kota Negara ini, terutama faktor-faktor yang nantinya berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, seperti pengurangan angka pengangguran, peningkatan produktivitas maupun partisipasi masyarakat setempat dalam memajukan ekonomi.

Penetapan perpindahan ibu kota ke wilayah Timur Indonesia diharapkan dapat mengurangi kesenjangan dan mewujudkan pembangunan Indonesia yang berkelanjutan, serta mewujudkan ibu kota baru yang sesuai dengan identitas bangsa. Secara spesifik, lokasi inti yang ditetapkan sebagai IKN baru terletak di sebagian wilayah dari dua kabupaten, yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Kutai Kertanegara (KuKar). Ibu Kota Negara Baru mempunyai lima visi, yaitu sebagai simbol identitas bangsa; sebagai kota yang smart, green, beautiful dan sustainable; modern dan berstandar internasional; tata kelola pemerintahan yang efisien dan efektif; serta sebagai pendorong pemerataan ekonomi di Kawasan Timur. (fisip.ui.ac.id, 2020). Dari pemaparan tersebut diatas, selanjutnya dilakukan analisis terkait Problematika Evaluasi Kebijakan Penetapan IKN dan Dampak Sosialnya.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam kajian permasalahan ini peneliti menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan studi literatur. Metode deskriptif ini bertujuan untuk mengetahui keadaan atau objek yang diteliti untuk selanjutnya dideskripsikan dengan jelas berdasarkan fakta fakta yang ada (Sugiyono: 2017). Oleh Arikunto, (2010) menjelaskan bahwa metode deskriptif ini adalah suatu metode yang digunakan untuk mengetahui dan menyelidiki suatu keadaan, kondisi atau hal lain yang sudah disebutkan yang hasilnya dipaparkan dalam laporan penelitian. Pada kajian permasalahan ini penulis menguraikan fenomena terkait Problematika Kebijakan Penetapan IKN Dan Evaluasi Dampak Sosialnya dengan data yang diperoleh berupa data sekunder dari berbagai jurnal maupun artikel ilmiah yang relevan.

## **KAJIAN TEORI**

### **Monitoring Evaluasi**

Monitoring merupakan kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Hasil akhirnya adalah pelaporan. Adapun pengertian evaluasi yaitu merupakan proses menentukan nilai atau pentingnya suatu kegiatan, kebijakan, atau program. Dalam hal ini, evaluasi adalah sebuah penilaian yang seobyektif dan sesistematik mungkin terhadap sebuah intervensi yang direncanakan, sedang berlangsung ataupun yang telah diselesaikan. (bppkpd.com, 2022)

Monev adalah kegiatan monitoring dan evaluasi yang ditujukan pada suatu program yang sedang atau sudah berlangsung. Monitoring sendiri merupakan aktivitas yang dilakukan pimpinan untuk melihat, memantau jalannya organisasi selama kegiatan berlangsung, dan menilai ketercapaian tujuan, melihat factor pendukung dan penghambat pelaksanaan program. Pada pelaksanaannya, monev haruslah dilakukan dengan prinsip-prinsip seperti berikut ini:

- a. Berorientasi pada tujuan. Monev hendaknya dilaksanakan mengacu pada tujuan yang ingin dicapai. Hasil monev dipergunakan sebagai bahan untuk perbaikan atau

peningkatan

- b. Mengacu pada kriteria keberhasilan. Monev seharusnya dilaksanakan mengacu pada kriteria keberhasilan program yang telah ditetapkan sebelumnya. Penentuan kriteria keberhasilan dilakukan bersama antara para evaluator, pelaksana program (pimpinan dan staf), lembaga terkait (peserta diklat).
- c. Mengacu pada asas manfaat Monev sudah seharusnya dilaksanakan dengan manfaat yang jelas. Manfaat tersebut adalah berupa saran, masukan atau rekomendasi untuk perbaikan program-program yang dimonev atau program sejenis di masa mendatang.
- d. Dilakukan secara obyektif Monev harus dilaksanakan secara objektif. Petugas monev dari pihak eksternal seharusnya bersifat independen, yaitu bebas dari pengaruh pihak pelaksana program. Petugas monev internal harus bertindak objektif, yaitu melaporkan temuannya apa adanya. (Trisianto, 2018)

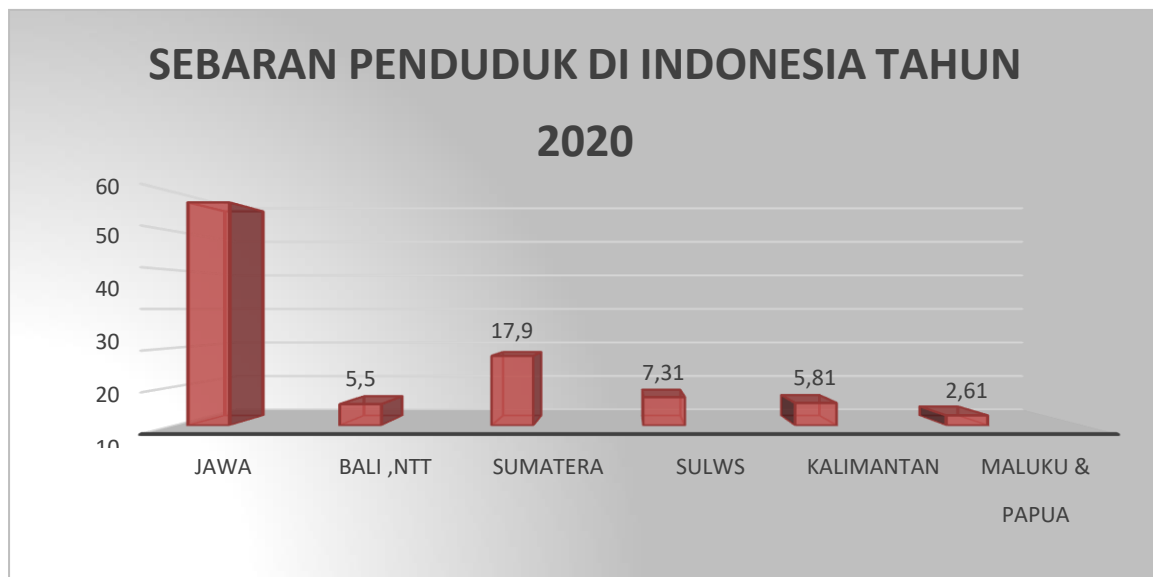
Menurut Hardlife and Zhou (2013), sistem monitoring dan evaluasi adalah toolkit manajemen yang memungkinkan pengambil keputusan untuk melacak kemajuan dan menunjukkan dampak dari program/proyek tertentu. Menurut Kusek dalam penelitian Legowo (2017), pada kajian literatur menunjukkan terdapat dua kategori umum sistem monitoring dan evaluasi, yaitu sebagai berikut:

- a. Implementation-Focused Monitoring and Evaluation Systems: Sistem Monitoring dan Evaluasi berfokus pada Pelaksanaan-Fokus menilai seberapa baik sebuah proyek, program, atau kebijakan yang sedang dijalankan.
- b. Result-Based Monitoring and Evaluation Systems: Sistem Monitoring dan Evaluasi berbasis pada hasil adalah alat untuk mengelola dan melacak kemajuan dalam program dan proyek. (Ariefni & Legowo, 2018)

### **Dampak Sosial**

Dalam Samudra Wibawa (1994:29) evaluasi dampak merupakan evaluasi yang mencermati dampak tetap atau dampak jangka panjang. Evaluasi dampak memberikan perhatian yang lebih besar kepada output dan dampak kebijakan. Dampak yang dimaksud adalah dampak yang diharapkan serta dampak yang tidak diharapkan. (Ade Saputri, et.al, 2021).

Rencana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Penajam Paser Utara terus berjalan, terutama karena dasar hukumnya telah disahkan. Alasan Penajam Paser Utara dijadikan Ibu Kota Negara secara geografis berada di tengah wilayah Indonesia, sehingga memunculkan anggapan akan dapat merepresentasikan keadilan. Selain itu Kalimantan Timur dianggap memiliki potensi konflik sosial yang rendah, serta memiliki budaya terbuka terhadap pendatang. Pemilihan wilayah ini juga dipandang memiliki aksesibilitas lokasi tinggi, dekat dengan dua kota besar yakni Balikpapan dan Samarinda. Kaltim juga dinilai memiliki kemampuan lahan sedang untuk konstruksi bangunan. Akan tetapi, kritik terus mengalir terkait pendanaan, potensi masalah dan proses legislasinya sendiri. Selain itu, pemindahan Ibu Kota Negara ini, banyak pengamat mengemukakan dapat menimbulkan berbagai resiko dan kerentanan sosial, dan yang lebih penting adalah dampak yang mungkin ditimbulkan terhadap masyarakat adat yang ada disana. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sudah banyak mendengar keluhan masyarakat sekitar tentang penanganan terhadap struktur masyarakat, cara hidup serta dampak pemindahan Ibukota Negara dari aspek social, budaya dan ekonomi (27/2/2020). Terhadap persoalan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo tanggal 26 Agustus 2019 telah mengisyaratkan agar berbagai faktor seperti sosial, ekonomi, politik, budaya dan pertahanan keamanan bahkan hingga aspek potensi bencana alam. Salah satu yang menjadi factor dipindahkannya IKN menurut data statistic penyebaran dan kepadatan penduduk dapat dilihat sebagai berikut :



Sumber : Doc, Humas FISIP UI,2019

Data tersebut memperlihatkan bahwa pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Penajam Pasir Utara menjadi sebuah keharusan dilakukan Pemerintah, mengingkat Pulau Jawa dengan tingkat kepadatan yang begitu Padat, misalnya saja Jakarta sebagai Ibu Kota Negara sudah tidak dapat lagi menampung beban yang terlalu berat (Statemen Presiden Jokowi, TV One, 2019 ) serta akumulasi berbagai persoalan di Ibu Kota Metropolitan seperti banjir, macet, minimnya air bersih, sehingga suka ataupun tidak Pemerintah harus mencari alternative Ibu Kota Baru. Pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan juga diikuti oleh perubahan sosial budaya yang pesat, baik perubahan ke arah positif maupun perubahan ke arah negatif. Setidaknya pemindahan IKN ini tidak menyebabkan terpinggirnnya masyarakat local oleh kehadiran pendatang baru. Data yang dihimpun bahwa kurang lebih eksodus penduduk ke Ibukota Negara baru diantaranya ASN dan keluarga dan diikuti dengan Pelaku ekonomi lainnya diperkirakan sebesar 1,5 Juta Jiwa (Rudy Soeprihadi, Deputy Pengembangan Regional Bappenas, 2020).

Relokasi ibu kota ke Kalimantan Timur sangat dikhawatirkan berpotensi memicu konflik sosial. Perubahan sosial budaya akan terjadi sangat cepat di ibu kota baru dan memungkinkan potensi konflik menjadi lebih besar. Hal ini sebagaimana disampaikan (Roni Septian Maulana, 2022), Ketua Departemen Bidang Advokasi Kebijakan mengatakan bahwa potensi konflik di Area IKN sangat mungkin terjadi, hal ini dikarenakan luas area IKN yang mencapai 256.142 hektar menurut UU no 3 Tahun 2022 Tentang IKN. Deputy II Sekjend ALiansi Masyarakat Adat (Aman), Erasmus Cahyadi (2021) telah memprediksi bahwa sedikitnya sekitar 20.000 ribu jiwa masyarakat adat terdampak eksodus akibat pembangunan mega proyek IKN.

Dari Aspek biaya, pemindahan ibu kota Negara ini tentu akan menghasbiskan anggaran yang cukup besar, namun tetap saja dilaksanakan, dengan tujuan pembangunan ekonomi secara merata. Sejatinya disituasi yang saat ini, anggaran tersebut akan lebih bijak dialokasikan terhadap pemulihan ekonomi pada sektor lain. Pemindahan Ibu Kota Negara bukan satu-satunya solusi dalam hal pemerataan pembangunan ekonomi. Maka wajar saja jika sampai dengan saat ini, banyak pengamat maupun praktisi yang masih mengkritik kebijakan tersebut. Terpilihnya Kalimantan sebagai lokasi pembangunan Ibu Kota Negara, tentu saja akan memberikan berbagai dampak di wilayah tersebut, namun dari sekian dampak yang mungkin timbul, adalah tercapainya pemerataan pembangunan sektor ekonomi. Dalam hal ini, maka yang tidak kalah penting, selama proses pembangunan Ibu Kota Negara baru dibangun, hingga

selesai nanti, memerlukan adanya monitoring evaluasi yang transparan dan akuntabel, hal ini dikarenakan pembangunan tersebut sudah dapat dipastikan akan memakan anggaran yang cukup besar, sehingga alokasi nya harus benar-benar tepat.

Pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan, tentunya akan memunculkan sektor jasa lainnya dalam peningkatan pendapatan dan kesejahteraan di wilayah tersebut, jika saat ini aktivitas perekonomian Kalimantan lebih di dominasi dengan hasil bumi seperti pertambangan, perhutanan dan perkebunan, maka dengan kehadiran Ibu Kota Negara baru, aktivitas perekonomian dari sector lain misalnya jasa dan sektor lain diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Merebaknya aktivitas perekonomian sebagai dampak kehadiran IKN sejatinya harus di dukung pula oleh tingkat perkembangan masyarakatnya, melalui peningkatan wawasan, pengetahuan maupun keterampilan sehingga usaha usaha untuk meningkatkan produktivitas menuju kesejahteraan masyarakat dan peningkatan devisa bagi daerah dapat tercapai dengan baik.

Perpindahan Ibu Kota ini sudah mulai memasuki tahap awal, oleh karena itu, monitoring dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan UU No. 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara, memiliki urgensi tersendiri dan harus terus menjadi perhatian Pemerintah Pusat dan seluruh rakyat Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Demi terwujudnya pemerataan dan keadilan dalam pembangunan nasional, maka melalui pemerataan ekonomi tentu akan menjadi salah satu fokus dari pemerintah pusat dalam penyusunan berbagai peraturan maupun program pemerintah. Pemerataan ekonomi pada dasarnya merupakan sebuah upaya yang diarahkan pada adanya kesempatan luas bagi seluruh warna Negara agar memperoleh pendapatan minimum, sehingga mampu mencukupi sandang, pangan dan papan secara adil. Namun dalam pelaksanaannya, pembangunan nasional saat ini, seringkali masih menunjukkan adanya ketimpangan ekonomi.

Mengutip pernyataan beberapa prkatisi maupun pengamat dari laman (lipi.go.id, 2019), disampaikan bahwa: Presiden Joko Widodo telah resmi mengumumkan pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur. Kebijakan ini selayaknya meningkatkan kesejahteraan wilayah sekitar ibu kota negara. Jangan sampai dari pemindahan Ibu Kota Negara ini justru menimbulkan marginalisasi terhadap masyarakat lokal yang nantinya akan memicu konflik. Disamping itu proses pembangunan ibu kota Negara juga cenderung dapat menimbulkan proses back wash, dimana sumber daya sekitar akan tersapu. Hal ini dapat menyebabkan mobilisasi sumber daya ke luar daerah. "Back wash dapat berdampak pada kekurangan sumber daya bagi wilayah sekitar pembangunan. Ini harus ditangani jangan sampai pembangunan ibu kota negara membawa kemunduran untuk wilayah lain. Selain itu, ibu kota baru baru memerlukan banyak penduduk untuk memastikan adanya konsumen (demand) sehingga harga barang atau kebutuhan dapat terjangkau. Banyaknya penduduk juga akan membawa keragaman sektor industri sehingga tidak hanya mengandalkan satu sektor saja. Jika konsumen tidak banyak, maka barang kebutuhan harus impor dari daerah lain. Dan biayanya harus ditanggung warga yang sedikit ini, membuat harga menjadi mahal, Kemungkinan adanya konflik sosial dapat terjadi, dan mitigasi bencana sosial harus sudah direncanakan. Jika suatu daerah yang pernah terjadi konflik sosial tidak lantas menjadi rawan konflik sosial. Daerah yang pernah terjadi konflik dapat menjadi daerah yang justru resistant terhadap konflik. Ini karena daerah tersebut sudah memiliki pengalaman mitigasi bencana sosial. Potensi konflik sosial di ibu kota negara dalam konteks budaya-demografis dapat terjadi dari sisi pendatang maupun lokal. "Beberapa potensi konflik sosial yang dapat terjadi di antaranya adalah keragaman etnis tetapi komposisinya tidak imbang, klaim-klaim kesultanan dengan konsep Sultan Grand, klaim-klaim



untuk mendapatkan posisi penting dari ormas berbagai etnis, dan penguasaan lahan. Sehingga, mitigasi konflik untuk dilakukan segera. Beberapa mitigasi konflik yang disarankan adalah segera menetapkan titik-titik lokasi yang akan menjadi area infrastruktur ibu kota negara dan status legal tanah-tanah yang akan digunakan.

Pemindahan ibu kota negara baru ke Kalimantan Timur yang bila dipaksakan tanpa kajian yang matang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial bagi masyarakat sekitar. Dampak ini harus dicermati agar pemindahan ibu kota negara tidak menimbulkan permasalahan baru di masa yang akan datang. Kepala Divisi Kajian Hukum dan Lingkungan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Dewi Puspa (2020) mengatakan, bahwa pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kalimantan Timur harus dianalisis dari semua aspek baik dari segi lingkungan, sosial, politik, maupun hukum. Terjadinya banjir di Penajam Paser Utara juga menunjukkan wilayah tersebut tidak layak digunakan sebagai lokasi IKN yang diklaim bebas dari bencana.

Membangun Ibu Kota Negara (IKN) tidak hanya menyiapkan infrastruktur dan lingkungannya saja, tetapi juga manusianya, baik yang akan pindah maupun yang telah lama menetap. Terdapat beberapa sektor yang akan dikembangkan di IKN agar masyarakat setempat dapat turut berpartisipasi dalam pembangunan IKN. Mulai dari sektor layanan, pendidikan tinggi, dan industri digital dan inovasi, ini yang akan kita kembangkan di kawasan Ibu Kota Negara. Sektor-sektor ini akan menarik penduduk baru ke sana karena dalam urbanisasi, masyarakat tidak akan mau berpindah kalau tidak ada kesempatan baru. Kita juga akan mempersiapkan masyarakat setempat supaya bisa berpartisipasi dalam pembangunan Ibu Kota Negara. Ini akan menyerap tenaga kerja yang signifikan, belum lagi saat nanti Ibu Kota Negara sudah berkembang demand-demand baru yang cukup signifikan dari sisi pertanian, ekonomi kecil menengah, dan lainnya. Dalam mewujudkan IKN yang majemuk dan harmonis sesuai dengan identitas bangsa Indonesia, diperlukan pemahaman dan perencanaan aspek sosial-budaya dan sosial-ekonomi yang komprehensif. Perencanaan aspek sosial dilaksanakan dengan memastikan faktor-faktor, seperti penerimaan masyarakat, peningkatan kualitas SDM, pemanfaatan dan pengembangan kearifan lokal, sumber- sumber penghidupan masyarakat, serta peran berbagai pihak termasuk generasi milenial dalam pembangunan IKN. “Sektor penyerapan tenaga kerja terbesar adalah perdagangan dan pertanian, tetapi penciptaan kesempatan kerja terbesar terjadi di sektor jasa pendidikan dan baru disusul perdagangan. Kementerian PPN/Bappenas telah melaksanakan berbagai kajian, termasuk aspek demografi, sosial dan budaya dalam pemindahan IKN. Kajian yang dilakukan merupakan tahap awal, yang perlu didiskusikan dan didalami lebih lanjut dengan berbagai pakar. (kominform.go.id, 2022).

## **KESIMPULAN**

Pemindahan Ibu Kota Negara ke Penajam Pasir Utara Kalimantan, tentu tidak terlepas dari adanya dampak social yang akan ditimbulkan, sehingga evaluasi menyeluruh dan terintegrasi hendaknya dilakukan mulai dari tahap perumusan, implementasi, serta evaluasi terhadap hasilnya. Seperti dikemukakan bahwa pemindahan ibu kota negara mengakibatkan berbagai dampak sosial di tengah masyarakat. Dampak tersebut tidak hanya bersifat positif, akan tetapi yang terjadi bisa juga dampak negatif misalnya berbagai persoalan tanah adat yang belum dimusyawarahkan, kompensasi terhadap hak hak masyarakat adat yang belum di tuntaskan serta berbagai persoalan lain yang hingga hari ini belum di rampungkan. Oleh karena itu, aspek monitoring dan evaluasi selama pelaksanaan proyek dipandang perlu, agar tidak memunculkan permasalahan di kemudian hari. Sejatinya pemindahan Ibu Kota Negara ini diharapkan mampu memberikan dampak sosial yang cukup tinggi terhadap peningkatan kesejahteraan dan lingkungan masyarakat sekitarnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ade Saputri, Rina & Warsono Hardi. (2021). Evaluasi Dampak Sosial Ekonomi Dalam Pengembangan Wisata Goa Seplawan Di Kabupaten Purworejo. <http://www.fisip.undip.ac.id/>
- [2] Ariefni, D. F., & Legowo, M. B. (2018). Penerapan Konsep Monitoring dan Evaluasi Dalam Sistem Informasi Kegiatan Mahasiswa Di Perbanas Institute Jakarta. *Jurnal Teknik Informatika Dan Sistem Informasi*, 4(3), 422–432. <http://dx.doi.org/1028932/jutisi.v4i3.876>
- [3] Dewi Puspa, (2020) Cermati Dampak Lingkungan Sosial Pemandangan IKN, Jakarta, Kompas.com
- [4] Hardlife. Z, and G. Zhou. “Utilisation of Monitoring and Evaluation Systems by Development Agencies: The Case of the UNDP in Zimbabwe”. *American International Journal of Contemporary Research*. Vol. 3 No. 3; March 2013.
- [5] Erasmus Cahyadi, (2021) Pembangunan Ibu kota Baru hormati hak masyarakat Adat, Jakarta, Kompas.com
- [6] Legowo, MB. “Monitoring and Evaluation Information System Modeling for Banking Credits”. *IJCSI International Journal of Computer Science Issues*. Volume 14 Issue 5, September 2017
- [7] S.Arikunto, (2010) Metode Penelitian, Jakarta, Rineka Cipta
- [8] bppkpd.com. (2022). *E-Monevren; Implementasi E-Monev (Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah)*. <https://www.bppkpd.com/layanan-aplikasi/e-monevren/>
- [9] N/A. (2019). Mengurai Efek Sosial Pemandangan Ibu Kota Negara. <http://lipi.go.id/berita/Mengurai-Efek-Sosial-Pemandangan-Ibu-Kota-Negara/21874>
- [10] N/A. (2020). Kajian Aspek Sosial Pemandangan Ibu Kota Negara. <https://fisip.ui.ac.id/kajian-aspek-sosial-pemandangan-ibu-kota-negara/>
- [11] N/A. (2022). Pembangunan Ibu Kota Negara Libatkan Masyarakat Lokal hingga Kembangkan Sektor Industri Digital dan Inovasi. [https://kominfo.go.id/content/detail/24653/pembangunan-ibu-kota-negara-libatkan-masyarakat-lokal-hingga-kembangkan-sektor-industri-digital-dan-inovasi/0/artikel\\_gpr](https://kominfo.go.id/content/detail/24653/pembangunan-ibu-kota-negara-libatkan-masyarakat-lokal-hingga-kembangkan-sektor-industri-digital-dan-inovasi/0/artikel_gpr)
- [12] Septian Maulana, (2022), Proyek IKN Berpotensi Timbulkan Konflik Agraria, Jakarta, Kompas.com
- [13] Sugiyono, (2017) Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Bandung, Alfabeta Silalahi, S. A. F. (2019). Dampak ekonomi dan risiko pemindahan ibu kota negara 19.
- [14] *Info Singkat Bidang Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 9(16), 19–24. <http://puslit.dpr.go.id>
- [15] Pandu, Pradipta. 2022. Cermati Dampak Lingkungan Dan Sosial Pemandangan Ibu Kota Negara.
- [16] <https://www.kompas.id/Baca/Ilmu-Pengetahuan-Teknologi/2022/02/02/Tematis-Cermati-Dampak-Lingkungan-Dan-Sosial-Pemandangan-Ibu-Kota-Negara>
- [17] Taufiq, M. (2020). PEMINDAHAN IBU KOTA dan POTENSI KONEKTIVITAS
- [18] PEMERATAAN EKONOMI. *Jurnal Vokasi Indonesia*, 8(1). <https://doi.org/10.7454/jvi.v8i1.156>
- [19] Trisianto, C. (2018). Penggunaan Metode Waterfall Untuk Pengembangan Sistem Monitoring Dan Evaluasi Pembangunan Pedesaan. *Jurnal Teknologi Informasi ESIT*, XII(01), 7–21.
- [20] Wibawa, Samodra Dkk. (1994). Evaluasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada